Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 25, No 2 (2025): Juli, 1138-1143
DOI: 10.33087/jiubj.v25i2.6196

e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939

Pengaruh Pengeluaran Non-makanan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2024

Budi Darma, Kasiyati Yunita Wulansari, Sri Rosmawati
Program Studi S1 Manajemen, Universitas Graha Karya Muara Bulian
Correspondence: 91bdarma@gmail.com, srirosmawati44@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran non-makanan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Batang Hari selama periode 2017–2024. IPM merupakan indikator komprehensif yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana, yang didukung oleh uji-t dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran non-makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Selain itu, nilai R^2 yang disesuaikan sebesar 0,784 mengindikasikan bahwa 78,4% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh perubahan dalam pengeluaran non-makanan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran non-makanan yang produktif dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan hasil pembangunan manusia di tingkat daerah..

Kata Kunci: pengeluaran non-makanan, indeks pembangunan manusia, regresi linier, pembangunan daerah, Batang Hari.

Abstract. *This study aims to analyze the effect of non-food expenditure on the Human Development Index (HDI) in Batang Hari Regency during the period 2017–2024. The HDI is a comprehensive indicator that reflects the quality of human development through 3 (three) main dimensions, namely: health, education, and standard of living. This study uses a quantitative approach with secondary data sourced from the Central Statistics Agency (CSA). Data analysis was carried out using simple linear regression, supported by t-tests and coefficient of determination (R^2). The results show that non-food expenditure has a positive and significant effect on the HDI. In addition, the adjusted R^2 value of 0.784 indicates that 78.4% of the variation in the HDI can be explained by changes in non-food expenditure. This finding suggests that increasing productive non-food expenditure can be an effective strategy to improve human development outcomes at the regional* level.

Keywords: *non-food expenditure, human development index, linear regression, regional development, Batang Hari.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Dalam konteks ini, pembangunan manusia dipahami sebagai upaya memperluas berbagai pilihan hidup masyarakat melalui pemberdayaan, perubahan struktur sosial, serta perbaikan institusi yang mendukung transformasi menuju tatanan yang lebih baik. Upaya tersebut tetap diarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan tingkat kemiskinan, serta penanganan terhadap kesenjangan pendapatan antar kelompok sosial (Todaro & Smith, 2020).

IPM telah menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah menargetkan peningkatan nilai IPM melalui berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan IPM antarwilayah di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tajam. Salah satu wilayah yang mencerminkan fenomena tersebut adalah Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi.

Salah satu aspek yang dapat memengaruhi pencapaian IPM, namun sering kali luput dari perhatian dalam kebijakan pembangunan lokal, adalah pengeluaran non

makanan rumah tangga. Pengeluaran non makanan mencakup pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, rekreasi, dan perumahan. Dalam teori konsumsi, pengeluaran non makanan mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan non-jasmani yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Ketika pengeluaran untuk kebutuhan non makanan meningkat secara proporsional terhadap total pengeluaran rumah tangga, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pergeseran dari pemenuhan kebutuhan dasar menuju pengembangan kapasitas manusia (Antoni, 2024; Yoga, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencerminkan capaian dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam konteks ini, pengeluaran rumah tangga, khususnya pengeluaran nonmakanan, memainkan peran penting karena mencerminkan alokasi konsumsi terhadap sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Berikut data pengeluaran nonmakan dan IPM Kabupaten Batang Hari tahun 2017-2024:

Tabel 1
Pengeluaran Nonmakan dan IPM Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2024

Tahun	Pengeluaran Nonmakanan	IPM
2017	311.764,15	68,92
2018	409.071,54	69,33
2019	441.926,48	69,67
2020	473.811,65	69,84
2021	501.204,56	70,11
2022	460.975,22	70,51
2023	701.946,00	71,02
2024	635.486,00	71,67

Sumber: data olahan

Berdasarkan data Tabel 1, Kabupaten Batang Hari menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai IPM, meskipun pengeluaran nonmakanan mengalami fluktuasi selama periode yang sama. Pada tahun 2017, pengeluaran nonmakanan tercatat sebesar Rp311.764,15 dan IPM berada pada posisi 68,92. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya kenaikan bertahap pada kedua indikator. Misalnya, pada 2019 pengeluaran meningkat menjadi Rp441.926,48 dengan IPM sebesar 69,67, dan pada 2021 pengeluaran mencapai Rp501.204,56, sementara IPM naik ke 70,11. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi untuk kebutuhan nonmakanan, capaian pembangunan manusia pun turut meningkat.

Namun demikian, data juga menunjukkan fluktuasi yang menarik. Pada tahun 2022, terjadi penurunan pengeluaran non-makanan menjadi Rp460.975,22, namun IPM tetap mengalami peningkatan dari 70,11 ke 70,51. Fenomena ini mengindikasikan bahwa faktor lain di luar besaran pengeluaran — seperti kualitas layanan publik, distribusi program sosial, atau reformasi kebijakan pendidikan dan kesehatan — juga turut berkontribusi terhadap peningkatan IPM.

Tren paling signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana pengeluaran nonmakanan melonjak tajam menjadi Rp701.946,00, tertinggi sepanjang periode delapan tahun. Kenaikan tersebut diikuti dengan peningkatan IPM ke 71,02. Namun, nilai IPM yang hanya meningkat 0,51 poin meskipun terjadi lonjakan besar dalam pengeluaran menunjukkan bahwa efektivitas pengeluaran terhadap peningkatan kualitas hidup belum maksimal. Ini bisa disebabkan oleh konsumsi yang kurang terarah atau distribusi pengeluaran yang tidak merata. Pada tahun 2024, pengeluaran nonmakanan mengalami penurunan menjadi Rp635.486,00, namun IPM justru mengalami kenaikan signifikan menjadi 71,67, yaitu kenaikan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini memperkuat asumsi bahwa bukan hanya jumlah pengeluaran, tetapi bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan secara produktif yang memengaruhi pencapaian pembangunan manusia.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan, secara signifikan berkorelasi positif dengan dimensi-dimensi dalam IPM. Penelitian Mastura (2024) di Kabupaten Batang Hari menegaskan bahwa rendahnya pengeluaran rumah tangga pada sektor kesehatan berkaitan erat dengan tingginya angka stunting dan rendahnya angka harapan hidup. Sementara itu, penelitian Nasution (2023) di tingkat provinsi menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan rumah tangga dapat menjadi determinan penting dalam peningkatan IPM apabila difasilitasi dengan infrastruktur sosial yang memadai.

Namun demikian, meskipun telah banyak studi yang menghubungkan faktor ekonomi makro seperti PDRB, pengangguran, dan kemiskinan dengan IPM, masih sangat terbatas kajian yang secara spesifik dan

longitudinal menelaah hubungan kausal antara pengeluaran non makanan rumah tangga dengan IPM di Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu 2017–2024. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang perlu segera diisi, mengingat pentingnya data berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam merancang kebijakan publik yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran non-makanan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2024

Tinjauan Pustaka

Pengeluaran Non Makanan

Pembangunan sosial ekonomi dan analisis kesejahteraan rumah tangga, pengeluaran non makanan merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan orientasi konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan hidup yang lebih luas daripada sekadar pangan. Secara umum, pengeluaran non makanan didefinisikan sebagai seluruh alokasi belanja rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di luar konsumsi makanan, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, rekreasi, perumahan, energi, serta layanan sosial lainnya (Artika & Marini, 2023). Pengeluaran ini mencerminkan kualitas hidup serta kapasitas akses rumah tangga terhadap berbagai layanan dasar penunjang pembangunan manusia.

Secara ekonomi, kecenderungan rumah tangga untuk mengalokasikan proporsi pengeluarannya pada sektor non makanan dipandang sebagai transisi dari fase pemenuhan kebutuhan dasar menuju pembangunan kualitas hidup. Penelitian Artika & Marini (2023) menekankan bahwa semakin tinggi proporsi pengeluaran non makanan, maka semakin besar pula kemungkinan rumah tangga telah memenuhi kebutuhan pangan secara memadai, dan mulai mengakses layanan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan.

Pola pengeluaran ini berakar pada teori ekonomi konsumsi, terutama melalui 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu: (1) hukum Engel (Engel's Law), yang menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga, proporsi pengeluaran untuk makanan akan menurun, sementara pengeluaran untuk kebutuhan non makanan akan meningkat. Artinya, pengeluaran non makanan merupakan indikator peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dalam masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke atas, pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi menjadi prioritas utama, menggantikan dominasi konsumsi pangan (Rionita & Widiastuti, 2020); (2) teori konsumsi absolut Keynes, yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga adalah fungsi dari pendapatan. Pada tingkat pendapatan rendah, konsumsi akan dominan diarahkan pada kebutuhan pangan. Namun, ketika pendapatan meningkat, maka porsi konsumsi untuk kebutuhan non esensial seperti perumahan layak, layanan pendidikan, dan jaminan kesehatan akan naik secara proporsional. Oleh karena itu, pengeluaran non makanan menjadi refleksi dari tingkat kesejahteraan relatif dalam ekonomi makro dan mikro (Hanum, 2018); dan (3) teori Utilitas Marginal, yang menjelaskan bahwa rumah tangga akan mengalokasikan konsumsi berdasarkan tingkat kepuasan yang diperoleh. Setelah kebutuhan dasar (makanan) terpenuhi, pengeluaran akan dialihkan ke sektor-sektor yang memberikan kepuasan tambahan lebih tinggi seperti rekreasi, teknologi, pendidikan anak, dan kenyamanan tempat tinggal. Maka, pengeluaran non makanan bukan hanya kebutuhan fungsional, melainkan juga representasi dari preferensi dan aspirasi rumah tangga.

Pendekatan-pendekatan tersebut, pengeluaran non makanan dapat dimaknai sebagai variabel yang tidak hanya relevan dalam studi konsumsi, tetapi juga memiliki implikasi besar dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini karena pengeluaran rumah tangga di sektor pendidikan dan kesehatan berkorelasi langsung dengan dua dari tiga dimensi utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pengetahuan dan umur panjang serta hidup sehat.

Penelitian Artika & Marini (2023) mengenai pola konsumsi masyarakat Kota Mataram menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran non makanan meningkat signifikan pada rumah tangga dengan pendapatan menengah atas, di mana belanja terbesar diarahkan pada pendidikan dan transportasi. Temuan serupa pada penelitian Rionita & Widiastuti (2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan memiliki hubungan positif dengan peningkatan kualitas kesejahteraan dan pola konsumsi yang lebih produktif. Dengan demikian, pengeluaran non makanan memiliki nilai strategis tidak hanya dalam konteks analisis konsumsi rumah

tangga, tetapi juga sebagai prediktor penting dalam studi pembangunan manusia, ketimpangan sosial, dan kebijakan kesejahteraan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara konseptual, IPM didefinisikan sebagai ukuran ringkas dari 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak (UNDP, 2023). Ketiga dimensi ini dianggap sebagai kebutuhan minimum universal bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat. Indikator kesehatan dalam IPM diukur melalui usia harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Dimensi pendidikan dikalkulasi dari dua indikator utama, yaitu harapan lama sekolah (expected years of schooling) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Sedangkan dimensi standar hidup direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, sebagai proksi dari daya beli dan kemampuan ekonomi rumah tangga.

Berbeda dari indikator ekonomi tunggal, IPM memadukan dimensi sosial dan ekonomi dalam satu kerangka analitis yang utuh. Dalam perhitungan IPM, ketiga dimensi tersebut dinormalisasi dan digabungkan menggunakan rata-rata geometrik, menghasilkan nilai indeks yang berskala 0–100 (di Indonesia umumnya dinyatakan dalam indeks berskala lokal). Semakin tinggi skor IPM, semakin tinggi pula pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah. Secara teoretis, IPM bertumpu pada kerangka "*Human Development Paradigm* yang menekankan bahwa pembangunan adalah proses memperluas pilihan-pilihan dasar manusia (*expanding capabilities*), bukan sekadar meningkatkan output ekonomi. Sen (1999) dalam karyanya *Development as Freedom* menjelaskan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai perluasan kebebasan substantif masyarakat, seperti kebebasan untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengadopsi IPM sebagai salah satu indikator utama untuk mengukur kemajuan pembangunan daerah. IPM tidak hanya digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), serta pemantauan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Nilai IPM juga sangat strategis dalam menentukan titik intervensi kebijakan sosial, termasuk pendidikan wajib 12 tahun, program jaminan kesehatan nasional, dan intervensi terhadap kemiskinan multidimensi.

Secara empiris, peningkatan IPM dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor mikroekonomi seperti pengeluaran non makanan rumah tangga, yang mencakup belanja untuk pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran tersebut memiliki korelasi langsung dengan dua dimensi IPM, yaitu pendidikan dan umur panjang sehat. Oleh karena itu, dalam banyak studi, IPM sering digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ekonomi pembangunan untuk menilai dampak kebijakan konsumsi, akses layanan dasar, maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, IPM bukan hanya sekadar alat ukur statistik, melainkan juga cerminan dari keberhasilan atau kegagalan sistem pembangunan itu sendiri dalam memberdayakan masyarakat. Kajian atas IPM secara mendalam akan membuka ruang refleksi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mengidentifikasi kelemahan struktural dan menentukan intervensi strategis demi pemerataan kesejahteraan di tingkat akar rumput.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti instansi pemerintah atau lembaga resmi, yang relevan dengan objek penelitian. Dalam studi ini, data diperoleh dari laporan-laporan dan publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang Hari, BPS Provinsi Jambi, serta dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Data yang dimanfaatkan mencakup informasi tahunan mengenai pengeluaran non makanan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Batang Hari selama periode 2017 hingga 2024. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan variabel independen (X) pengeluaran non makanan per kapita, dan variabel dependen (Y) indeks pembangunan manusia (IPM). Persamaan regresi linier sederhana model penelitian ini adalah:

$\hat{Y} = a + \beta X$

Keterangan : Y = Prediksi nilai IPM; a = konstanta; β_1 = Koefisien Regresi; X = Pengeluaran nonmakanan

Untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel-variabel tersebut, dilakukan uji t, yaitu uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien regresi β\betaβ signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini melibatkan perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikansi tertentu (biasanya 5%). Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah: jika nilai t hitung > t tabel, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen; dan jika nilai t hitung ≤ t tabel, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Darma, 2021),.

Selanjutnya, untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen, digunakan koefisien determinasi yang disimbolkan dengan R^2. Nilai R^2 berada dalam rentang antara 0 hingga 1, dan mengindikasikan proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam IPM disebabkan oleh faktor lain di luar pengeluaran non makanan.

HASIL

Tabel 2
Output Tabel Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	66.903	.645		103.652	.000
	Nonmakanan	6.566E-6	.000	.903	5.143	.002

Sumber: data olahan

Tabel 2 diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 66,903 dan nilai koefisien IPM (b) sebesar 0,000006566. Dari data tersebut, maka didapat persamaan sebagai berikut:

Y = 66,903 + 0,000006566 X

Artinya:

- Nilai konstanta sebesar 66,903 menunjukkan bahwa jika pengeluaran nonmakanan berada pada titik nol, maka IPM Kabupaten Batang Hari diperkirakan berada pada angka 66,903. Meskipun dalam praktiknya pengeluaran nonmakanan tidak mungkin benar-benar nol, nilai ini memberikan gambaran tentang posisi awal IPM saat tidak ada nilai variabel independen.
- Koefisien regresi sebesar 0,000006566 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu rupiah dalam pengeluaran nonmakanan akan berdampak pada peningkatan IPM sebesar 0,000006566 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Artinya, semakin besar alokasi pengeluaran nonmakanan, maka secara teoritis nilai IPM juga akan meningkat, meskipun dalam skala yang sangat kecil per satuan rupiah.

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,143 dan t tabel sebesar 2,44691 pada taraf signifikansi 5%. Karena nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (5,143 > 2,44691), maka dapat dikatakan bahwa variabel pengeluaran nonmakanan berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Batang Hari. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam pengeluaran nonmakanan yang mencakup konsumsi rumah tangga di sektor-sektor non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan secara statistik mampu mendorong kenaikan IPM. Dengan demikian, pengeluaran nonmakanan dapat dipahami sebagai salah satu faktor penting dalam menjelaskan variasi capaian pembangunan manusia di tingkat daerah, khususnya dalam konteks Kabupaten Batang Hari selama periode 2017 hingga 2024.

Tabel 3
Output Tabel Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.903[a]	.815	.784	.41942

Sumber: data olahan

Nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,784. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 78,4% variasi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Batang Hari selama periode 2017 hingga 2024 dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran nonmakanan sebagai prediktor dalam model. Dengan kata lain, kontribusi pengeluaran nonmakanan terhadap perubahan nilai IPM cukup besar, yakni hampir empat perlima dari total variasi IPM yang terjadi. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 21,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti kebijakan pendidikan, akses layanan kesehatan, partisipasi masyarakat, atau variabel makro lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa pengeluaran nonmakanan merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan manusia di tingkat lokal, karena berkaitan erat dengan dimensi kualitas hidup yang menjadi indikator utama dalam IPM.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tedapat hubungan positif dan signifikan antara pengeluaran nonmakanan dan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2025.

DAFTAR PUSTAKA

Antoni, D. J. 2024. Analisis pengaruh infrastruktur terhadap IPM di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia

Artika, I. B. E., & Marini, I. A. K. 2023. Implikasi ekonomi dari pola konsumsi pangan dan non pangan masyarakat Kota Mataram tahun 2018–2022. *Jurnal Ganec Swara*.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang Hari. 2024. *Indeks pembangunan manusia Kabupaten Batang Hari tahun 2024*.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. 2024. *Provinsi Jambi dalam angka 2024*.

Darma, Budi. 2021. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R^2)*. Jakarta: Guepedia.

Hanum, N. 2018. Pengaruh pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga nelayan di Desa Seuneubok Rambong Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 34–41

Mastura, S. P. 2024. Faktor penyebab kejadian stunting di Kabupaten Batang Hari, *Tesis*, Universitas Jambi

Nasution, M. I. 2023. Belanja modal dan IPM di kabupaten/kota Provinsi Jambi, *Skripsi,* Universitas Jambi

Rionita, D., & Widiastuti, T. 2020. Tingkat pendidikan, pendapatan dan religiusitas terhadap perilaku konsumsi rumah tangga muslim di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 35–42.

Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2020. *Economic development*, 13th ed. Pearson Education.

United Nations Development Programme (UNDP). 2023. *Human development report 2023/2024*.

Yoga, G. A. D. M., 2024. Pengeluaran non makanan dan IPM di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 21–35.